

**RATIFIKASI THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)
OLEH SINGAPURA TAHUN 2017**

Oleh : Salby Aurizaldi Putri
Pembimbing: Dr.Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel
Jurusan Hubungan Internasional`
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research describes about Singapore's reason for ratified International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) in 2017. Singapore as a multiracial state is upholding social harmony, yet that does not make Singapore free from racial discrimination. Minority and immigrant worker often get discrimination. The government has made attempts to reduce racial discrimination in its society. As a country that adheres to semi-authoritarian system, many individual rights are limited by the government, as well as civil society groups whose movements are limited by strict regulations and policies. However, in contrast to the facts, Singapore ratified ICERD in 2017.

The author collects data from books, academic journals, official websites, articles and also official documents related to this research, then uses document analysis as a research method. The issue of this study is to analyze Singapore's reason which has ratified ICERD in 2017 using theory the cost of commitment from Oona Hathaway, and the level of analysis is state.

The result of the study shows that civil society groups played a very large role in the government's decision to ratify ICERD in 2017. One of the civil society group coalition, COSINGO, succeeded in submitting their reports to UPR through the UPR Pre-Session and recommended Singapore to ratify ICERD as soon as possible. Many actions were taken by civil society groups which indirectly influenced the government to ratify ICERD in 2017.

Keywords: ICERD, Civil Society Groups, Racial Discrimination, Ratification.

PENDAHULUAN

Singapura adalah salah satu negara dengan berbagai macam etnis didalamnya. Pada tahun 2021, mayoritas etnis di negara tersebut adalah etnis Cina (75,9%), diikuti dengan etnis Melayu (15,1%), etnis India (7,4%) dan etnis lainnya (1.6%).¹

Sebagai negara multi-etnis, Singapura tak luput dari permasalahan diskriminasi dan konflik antar ras/etnis. Padahal, sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, pemerintah Singapura terus mendorong keharmonisan antar ras dengan menerapkan tiga prinsip, yaitu; pertama, meritokrasi; Kedua, pemerintahan yang sekuler; Ketiga, multirasialisme.²

Salah satu penyebab mengapa permasalahan diskriminasi di Singapura tidak terlalu diungkit pada awalnya adalah faktor sistem pemerintahan negara yang semiotoriter. Pemerintah Singapura menerapkan aturan yang ketat dalam mengatur perilaku rakyatnya, mulai dari aturan lalu lintas, kebersihan di tempat umum, hingga kebebasan berpendapat masyarakatnya.³ Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang sulit untuk menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi

kepada pemerintah.

Diskriminasi di Singapura kerap menimpa kelompok-kelompok minoritas di Singapura, etnis Melayu dan India, di berbagai bidang. Berdasarkan laporan dari Hirschmann pada situs *Statista*, 62,8% etnis Cina mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami dan merasakan diskriminasi di tempat kerja, sedangkan etnis Melayu, 40,4% pernah merasakan dan mengalami diskriminasi di tempat kerjanya⁴. Etnis minoritas lainnya juga menghadapi hal yang sama, di bidang pendidikan, sulit untuk mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Mereka sering mendapatkan prasangka rasial ketika mencari pekerjaan maupun ketika mencari perguruan tinggi.

Selain itu, terbatasnya akses layanan kesehatan kepada minoritas yang disebabkan oleh tidak mencukupinya biaya yang mereka punya untuk mendapatkan layanan tersebut, serta kendala bahasa yang dialami, karena kurangnya penerjemah bahasa Melayu dan Tamil di fasilitas kesehatan umum⁵.

Pekerja migran domestik, tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana pekerja lainnya, seperti libur nasional, libur akibat sakit.

¹ Singapore Government, "Population in Brief 2021," 29 Desember 2021, Hal.21, <https://www.population.gov.sg/files/media-centre/publications/population-in-brief-2021.pdf>.

² "Public Consultation on Singapore's Draft State Party Report on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)," REACH Website, diakses pada 29 Januari 2022, pukul 13.27, [https://www.reach.gov.sg/participate/public-consultation/ministry-of-culture-community-and-youth/community-relations-and-engagement-division/public-consultation-](https://www.reach.gov.sg/participate/public-consultation/ministry-of-culture-community-and-youth/community-relations-and-engagement-division/public-consultation-on-singapores-draft-state-party-report-on-icerd)

[on-singapores-draft-state-party-report-on-icerd](https://www.reach.gov.sg/participate/public-consultation/ministry-of-culture-community-and-youth/community-relations-and-engagement-division/public-consultation-on-singapores-draft-state-party-report-on-icerd).

³ Robert Dayley dan Clark D. Neher, *Southeast Asia in the New International Era*, 6th ed., (Boulder: Westview Press., 2013), Hal 305.

⁴ R. Hirschmann, "Perceptions of discrimination when using public services Singapore 2019," di dalam Imam Subchi, dkk. "Discrimination among Ethnic Minorities Groups in Singapore," *INSANIYAT, Journal of Islam and Humanities*, Vol.5 (2), (May, 2021), loc.cit, Hal. 83

⁵ Community Action Network (Singapore), 2021, hal. 5.

Laporan yang didapat oleh HOME (*Humanitarian Organization for Migration Economics*) menyatakan bahwa rata-rata jam kerja para pekerja migran domestik adalah 13 jam perhari dan 40% dari mereka tidak mendapatkan hari libur dalam seminggu⁶. Hak-hak mereka sebagai pekerja tidak termasuk ke undang-undang pekerja yang dibuat oleh pemerintah.

Singapura menandatangani ICERD pada Oktober 2015 dan meratifikasinya pada November 2017.⁷ Hal ini merupakan salah satu upaya Singapura untuk mengurangi adanya diskriminasi ras, dan juga untuk menciptakan harmoni antar etnis dan ras. Singapura memasukkan laporan pertamanya pada tahun 2018, diikuti dengan laporan-laporan yang dikirimkan oleh beberapa NGO di Singapura seperti HOME dan TWC2, CAN, dan lainnya. Melalui laporan-laporan yang dikirimkan, terdapat satu inti permasalahan, yaitu adanya diskriminasi ras baik itu di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun sosial.

KERANGKA DASAR

A. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Oona Hathaway, seorang akademisi yang meneliti tentang mengapa sebuah negara meratifikasi perjanjian HAM

internasional melalui biaya komitmen (*the cost of commitment*) yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Hathaway berpendapat bahwa sebuah negara ketika mempertimbangkan apakah akan meratifikasi suatu perjanjian atau tidak, akan memperhitungkan biaya yang akan didapat dari mematuhi perjanjian tersebut, yaitu perubahan perilaku sebuah negara yang diakibatkan oleh meratifikasi sebuah perjanjian internasional.⁸ Negara akan memperhitungkan keuntungan yang didapat dan biaya atau bayaran yang harus dikeluarkan dari mematuhi sebuah perjanjian, dengan begitu mereka dapat memilih apakah akan berkomitmen terhadap perjanjian tersebut atau tidak. Hathaway melihatnya dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang rasionalis (*rationalist view*), sudut pandang kedaulatan (*sovereignty view*), dan sudut pandang normative (*normative view*).⁹

Berdasarkan sudut pandang rasionalis, sebuah negara akan meratifikasi perjanjian jika perjanjian tersebut dapat memenuhi kepentingan negara tersebut dengan mempertimbangkan faktor domestik dan internasionalnya.

Semakin tinggi jumlah NGO di negara tersebut maka akan semakin besar kemungkinannya negara tersebut melakukan perjanjiannya

⁶ Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) & Transient Workers Count Too (TWC2), "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Shadow Report for Singapore," October 2021, hal.4, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/SHARED%20Documents/SGP/INT_CERD_NGO_SGP_47073_E.pdf

⁷ Linette Lai, "Singapore submits first report on ICERD, the convention to eliminate racial discrimination," *The Strait Times*, 2018, diakses pada 30 Desember 2021, pukul 10.09, <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-submits-first-report-on-icerd-the-convention-to-eliminate-racial-discrimination>.

⁸ Oona A. Hathaway, "The cost of commitment," *Stanford Law Review*. 55 (2002), hal.1834

⁹ Oona A. Hathaway, *ibid*, hal.1824

karena negara mendapat tekanan yang lebih besar dari NGO-NGO tersebut.

Keberadaan NGO yang berfokus HAM dan kelompok masyarakat sipil di Singapura tentu sangat mempengaruhi Singapura ketika hendak mengambil keputusan. Tuntutan dan desakan yang diberikan kepada Singapura untuk mengusut kasus diskriminasi ras ini menjadi salah satu dorongan Singapura untuk menandatangani ICERD.

Dalam *rationalist view*, negara mendapatkan biaya komitmen berupa biaya kepatuhan, dimana sikap atau perilaku sebuah negara akan berubah ketika negara tersebut telah meratifikasi sebuah perjanjian HAM internasional. Biaya kepatuhan Singapura adalah perubahan yang terjadi pada bidang politik dan sosialnya, namun biaya yang diterima oleh Singapura ini dapat dikurangi karena adanya pengaruh domestik tersebut, yaitu pergerakan kelompok masyarakat sipil yang sejak awal sudah mendorong pemerintah untuk memperhatikan masalah HAM di Singapura, sehingga tidak banyak perubahan yang terjadi setelah Singapura meratifikasi ICERD.

B. Tingkat Analisis: Negara

Mochtar Mas'ood membagi tingkat analisa menjadi 5 yaitu, individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-negara dalam suatu region dan sistem global.¹⁰ Penelitian ini menggunakan tingkat analisa negara, yaitu mengenai Singapura yang meratifikasi perjanjian internasional ICERD.

C. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan yang

telah dipaparkan diatas, maka hipotesa yang di hasilkan dari penelitian ini adalah “Singapura meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) pada tahun 2017 karena semakin besarnya pengaruh NGO dan kelompok masyarakat sipil dalam menyuarakan isu-isu diskriminasi ras di Singapura”.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari catatan atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah *Document Analysis* yaitu meninjau dan mengevaluasi dokumen baik itu berupa materi cetak maupun materi elektronik.¹¹ Penulis meninjau dokumen berupa laporan-laporan ICERD yang diberikan beberapa NGO kepada Singapura juga melalui artikel, jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination—ICERD*)

Diskriminasi ras dapat berupa diskriminasi terhadap warna kulit, etnis, ras, keturunan dan juga kewarganegaraan. Untuk mengurangi

¹⁰ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal 46.

¹¹ Gleen A. Bowen, “Document Analysis as a Qualitative Research Method,” *Qualitative Research Journal*, vol.9, no.2 (2009), hal 27.

diskriminasi ras yang terjadi di dunia, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah konvensi yang membahas mengenai hal ini.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang biasa dikenal juga dengan ICERD adalah salah satu konvensi internasional HAM tertua dan yang pertama di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 21 Desember 1965,¹² dan mulai berlaku pada 4 Januari 1969.¹³ Konvensi ini membahas tentang macam-macam diskriminasi rasial dan apa yang harus dilakukan sebuah negara untuk mengurangi dan mencegah terjadinya diskriminasi tersebut.

Hingga saat ini, sudah 182 negara yang meratifikasi konvensi ini dan 88 negara yang menandatangani.¹⁴

Negara memiliki kewajiban selain memberikan laporan setiap 2 tahun kepada komite. Negara wajib melarang adanya diskriminasi rasial dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk perlakuan, kebijakan, propaganda atau bahkan verbal sekalipun. Negara harus mengambil langkah positif atau afirmatif yang dapat mencegah dan mengurangi adanya diskriminasi rasial. Langkah-langkah tersebut dapat berupa pembuatan undang-undang,

peraturan, inisiatif pajak atau bahkan dapat dilakukan oleh sekolah maupun kegiatan bisnis, dan bersifat sebagai proyek sementara.¹⁵

CERD melihat betapa pentingnya data-data yang dikumpulkan untuk mengukur seberapa parahnya atau bagian mana dari masyarakat yang mengalami diskriminasi rasial. Data-data tersebut harus mencakup ras, warna kulit, keturunan, etnis, kewarganegaraan, jenis kelamin, dan harus diperkuat dengan adanya data mengenai sosial-ekonomi juga status budaya dari kelompok-kelompok etnis yang ada, selain itu partisipasi politik dan perkembangan ekonomi di negara tersebut juga sangat dibutuhkan.¹⁶

B. Diskriminasi Ras/Etnis di Singapura

Walaupun Singapura dikenal sebagai negara yang menjaga keharmonisan sosial dan negara yang multi-etnis, pada kenyataannya, masih banyak terjadi diskriminasi ras yang disebabkan baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh pemerintah. Bahkan mereka memiliki stereotipe yang buruk terhadap kelompok minoritas, contohnya murid yang beretnis melayu dianggap sebagai murid yang malas, sedangkan murid beretnis Cina dianggap rajin

¹² "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination," United Nations Human Rights Office of the High Commissioner Website, diakses pada 30 Januari 2021, pukul 08.57,

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>.

¹³ Kristin Henrard dan Robert Dunbar, *Synergies in Minorities Protection: European and International Law Perspectives*, (Cambridge University Press, 2009), Hal 249.

¹⁴ Gay McDougall, "The International Convention on the Elimination of All Forms

of Racial Discrimination," United Nations Audiovisual Library of International Law, 2021,

hal.6, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cerd/cerd_e.pdf

¹⁵ General Recommendation No.32,

"International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination", CERD/C/GC/32, Hal.5.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fGC%2f32&Lang=en

¹⁶ Ibid.

oleh para guru magang.¹⁷

Diskriminasi sering terjadi terutama secara verbal. Tahun 2011, anggota dari *Young People's Action Party* (YP) memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai tersebut setelah sebelumnya ia ketahuan mengunggah foto seorang anak melayu yang sedang duduk di dalam bus di facebook dengan kalimat "Bus ini diisi oleh para bakal teroris muda?".¹⁸ Selain itu, dalam sebuah studi dilakukan oleh Velayutham didapati bahwa etnis India sering mengalami rasisme dalam bentuk verbal dengan membawa-bawa bentuk fisik dan warna kulit mereka, yang terjadi dimana saja seperti sekolah, sarana publik dan kolam renang. Studi ini juga menunjukkan bahwa rasisme berdampak buruk bagi mental seseorang.¹⁹ Mereka kehilangan percaya diri, dan malu terhadap tubuh mereka sendiri, mereka menjadi ragu dengan diri nya.

Sulit bagi perempuan muslim mendapatkan kerja karena hanya sedikit tempat yang mau menerima mereka berhijab. Pemerintah dan masyarakat umum menganggap bahwa hijab tidak sesuai dengan sekulerisme yang dianut oleh Singapura.²⁰ Etnis Melayu sempat

mendesak pemerintah pada tahun 2002 dan 2003 agar anak-anaknya diperbolehkan memakai hijab ke sekolah, namun ditolak oleh pemerintah.²¹ Special Assistance Plan (SAP) sebagai salah satu program pemerintah yang diadakan pada tahun 1980, dan kampanye Speak Mandarin pada 1979 dinilai justru merugikan anak-anak minoritas.²²

Pasien-pasien yang datang untuk berobat tak jarang mendapatkan kata-kata rasis yang tidak berhubungan dengan penyakitnya, bahkan ada yang tidak ingin memeriksa pasien tersebut karena etnisnya. Tidak adanya penerjemah bahasa minoritas seperti bahasa melayu dan bahasa tamil untuk para lansia di rumah sakit, dimana tidak semua lansia pandai berbahasa mandarin atau Inggris, menjadikan lansia kesulitan untuk berkomunikasi baik dengan dokter maupun perawat.

Berdasarkan penelitian HOME, 54% dari pekerja yang mengikuti survey mendapatkan perhatian medis yang memadai dan 43% darinya juga mendapatkan perawatan ke dokter oleh perekrutnya, sedangkan 13% pekerja tidak dibolehkan untuk melihat dokter untuk mendapatkan

¹⁷ Peter K.H Chew, "Racism in Singapore: A Review and Recommendations for Future Research," *Journal of Pacific Rim Psychology*, Vol.12, e5, (2018), hal.3

¹⁸ Mathew Mathews dan Mohammad Khamsya Bin Khidzer, "Chapter 5: Preserving Racial and Religious Harmony in Singapore," di dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chen (Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2015), hal.124.

¹⁹ Selvaraj Velayutham, "Everyday Racism in Singapore," di dalam *Everyday Multiculturalism*, (Palgrave Macmillan UK, 2009), hal.265,266,268, diakses pada 18 Juli 2022, pukul 19.47,

https://www.researchgate.net/publication/352837277_Everyday_Racism_in_Singapore

²⁰ Imam Subchi, dkk, "Discrimination among Ethnic Minorities Groups in Singapore," *INSANIYAT, Journal of Islam and Humanities*, Vol.5 (2) May 2021, Hal.85

²¹ Hussin, "The Singapore Minority Dilemma," *Asian Survey*, Vol.51, No.6, pp.1156-1171(November/December 2011), hal. 1169, diakses pada 18 Juli 2022, pukul 12.39, melalui https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2011.51.6.1156?seq=14#metadata_info_tab_contents

²² Hussin, loc.cit.

perawatan oleh perekrutnya.²³ Buruknya kualitas tempat tinggal yang ditempati oleh pekerja migran menjadi salah satu penyebab mudahnya mereka untuk jatuh sakit.

Menurut data yang didapat oleh Blackbox, 51,4% warga Singapura pernah merasakan atau mendapatkan diskriminasi dan 3 jenis diskriminasi yang paling sering mereka dapatkan secara langsung adalah rasisme (28%), diskriminasi agama (20%) dan seksisme (19%).²⁴ Data tersebut juga menunjukkan bahwa 3 jenis diskriminasi tersebut sering didapat oleh mereka yang beretnis Melayu dan India, dengan rentang umur 15-24 tahun.

Dari tahun 2014 hingga awal tahun 2021, terdapat sekitar 379 laporan mengenai diskriminasi yang terjadi di tempat kerja yang diterima oleh otoritas Pengawas Ketenagakerjaan Adil di Singapura. 60% dari laporan tersebut adalah diskriminasi terhadap kewarganegaraan, sedangkan sisanya adalah diskriminasi berdasarkan umur (69 kasus), gender (49 kasus), dan ras serta bahasa (39 kasus), sisanya karena status pernikahan, keluarga, agama dan disabilitas (20 kasus).²⁵

Selain itu, masalah tenaga kerja migran pun tidak pernah berhenti dibahas di Singapura, karena masih lemahnya peraturan yang menyokong mereka di sana, dan sulitnya untuk

mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Upah yang diberikan kepada pekerja konstruksi berkebangsaan Bangladesh dan India umumnya akan lebih kecil (paling tinggi S\$30 per hari) dibandingkan pekerja yang berkebangsaan China (paling tinggi S\$64 per hari) meskipun memiliki kemampuan, pengalaman dan kerja yang sama. Dalam salah satu kasus dilaporkan bahwa seorang pekerja berkebangsaan Bangladesh justru harus membayar sekitar S\$10.000 sampai S\$16.000 ketika perekrutan dan penempatan pekerja dilakukan, padahal gaji yang mereka dapat hanya berkisar antara S\$468 sampai S\$600.²⁶

Pekerja migran domestik yang tinggal bersama dengan keluarga majikan sering kali mendapatkan pelecehan, dikurung bahkan diisolasi, seperti hasil penelitian HOME yang menunjukkan sekitar 73% pekerja migran domestik dibatasi untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan 74% darinya diberikan batasan dalam bergerak.²⁷ Pekerja migran domestik juga sulit untuk mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Tahun 2014, 8 dari 20 pekerja meminta pertolongan kepada HOME karena mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang layak. Sedangkan pada tahun 2017, ada beberapa pekerja yang komplain tentang mereka yang tidak

²³ Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) & Transient Workers Count Too (TWC2), "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Shadow Report for Singapore," 2021, hal.18-19.

²⁴ Blackbox, "Workplace Discrimination: How Harmonious Are We?," diakses pada 21 Juli 2022, pukul 14.35, <https://blackbox.com.sg/everyone/discrimination-in-singapore-how-harmonious-are-we>

²⁵ Justin Ong, "60% of job discrimination complaints in S'pore each year are nationality-based," The Strait Times, diakses pada 21 Juli 2022, pukul 14.43, <https://www.straitstimes.com/singapore/policies/60-of-job-discrimination-complaints-in-singapore-each-year-are-nationality-based>

²⁶ HOME, "Wage Theft & Exploitation among Singapore's Migrant Workers," 2017, Hal.10

²⁷ HOME, *ibid*, Hal.23

mendapatkan makanan yang layak, dan hanya diperbolehkan untuk makan mi dan roti, atau yang paling buruk adalah makanan sisa dari keluarga majikan, mereka juga tidak diperbolehkan untuk makan atau mengemil dan hanya boleh minum air untuk menahan rasa lapar mereka.²⁸ Berdasarkan studi yang dilakukan oleh CARE dan Healthserve, 86.2% dari 500 responden menyatakan mereka menjadi sakit karena makanan yang disediakan oleh tempat mereka bekerja atau pihak yang memasak makanan mereka.²⁹

C. Perubahan Sistem Ekonomi

Singapura mengalami perubahan sistem, yaitu dari semi-otoriter menjadi neoliberal. Perubahan sistem ini sangat berdampak pada perkembangan kelompok masyarakat sipil. Sebelumnya, sulit bagi kelompok masyarakat sipil di Singapura untuk berkembang dan bergerak menyuarakan pendapat mereka karena peraturan yang begitu ketat, dan PAP sendiri memandang mereka sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan mereka.

Sebelum perubahan sistem tersebut, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan yang kuat untuk mengatur perekonomian. Namun, setelah mengalami resesi besar-besaran pada tahun 1980-an, Singapura mulai merubah strategi mereka di bidang perekonomian. Berhasil mengatasi inflasi pada 1970-an dengan beberapa kebijakan

ekonomi baru mereka yang mulai terbuka, pemerintah Singapura semakin yakin untuk mengubah dan mengganti mekanisme serta instrument mereka menjadi berbasis pasar terbuka.³⁰ Sejak saat itu, Singapura mulai berubah menggunakan sistem neoliberalisme untuk perekonomian mereka.

Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah melakukan liberalisasi di beberapa bidang, salah satunya adalah mulai dilonggarkannya aturan mengenai kelompok masyarakat sipil. Pemerintah juga menuntut masyarakat dan kelompok masyarakat sipil untuk berperan dalam perkembangan bangsa.

Masyarakat sipil yang liberal membutuhkan negara yang liberal agar mereka mendapatkan lingkungan yang mendukung secara institusional, sehingga mereka dapat memiliki wewenang untuk memberikan kritikan atas pelaksanaan kekuasaan negara.³¹

Hal inilah yang mulai terjadi di Singapura, perkembangan dari masyarakat sipil dan semakin masifnya pergerakan mereka membuat pemerintah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada dan membuat serta menerapkan kebijakan sipil tanpa bantuan kelompok masyarakat sipil.

Akibat dari liberalisasi yang digalakkan pemerintah di berbagai bidang, kelompok masyarakat sipil dapat memusatkan perhatian public

²⁸ HOME, ibid, Hal.24

²⁹ HOME, ibid, hal.25.

³⁰ Syamsul Anwar dan Kharisma Danang Yuangga, "Pertumbuhan Ekonomi di Singapura sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore," *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 4 (1) Tahun 2019, Hal.39,

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/3825>

³¹ Garry Rodan, "Singapore 'Exceptionalism'? Authoritarian Rule and State Transformation," *Asia Research Centre, Working Paper No.131*, Murdoch University, (May 2006), hal.4

pada isu-isu yang mereka angkat, sulit bagi pemerintah untuk mencegah atau mengabaikannya lagi. Pada saat inilah terjadi advokasi kebijakan, dimana mereka yang berperan sebagai advokat dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan agar dapat menyesuaikan dengan tujuan mereka. advokat ini dapat berupa kelompok masyarakat sipil, maupun organisasi luar negeri yang memiliki pengaruh besar.

Kritik-kritik yang diberikan kepada pemerintah pun diterima bukan hanya karena perkembangan internet yang membuat hampir semua informasi menjadi transparan, namun karena juga konsistensi dari PAP yang merespon semua kritik yang diberikan kepada mereka.

D. Pengaruh Kelompok Masyarakat Sipil Sebelum Singapura Meratifikasi ICERD

Beberapa kelompok masyarakat sipil yang aktif menyuarkan masalah HAM salah satunya masalah diskriminasi ini adalah HOME, TWC2, MARUAH, Community Action Network, dan Anti-Racism Coalition (Singapore).

Kelompok-kelompok ini sering menyuarkan tentang diskriminasi HAM yang terjadi di Singapura, seperti melakukan aksi di Speaker's Corner yang sengaja dibuat oleh pemerintah Singapura sehingga kelompok masyarakat sipil memiliki tempatnya sendiri untuk beraksi tanpa harus turun dan menyebar ke jalan. Tidak hanya dengan melakukan aksi di Speaker's Corner, kelompok-

kelompok ini juga membantu mereka yang memiliki masalah, seperti membantu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

TWC2 adalah kelompok masyarakat sipil yang masuk NGO, adalah kelompok yang berfokus pada pergerakan untuk membantu dan menyuarkan permasalahan dari pekerja-pekerja migran, terutama pekerja migran domestik. Kelompok ini menyediakan layanan advokasi untuk para pekerja yang membutuhkan, mereka juga menyediakan layanan ambulan, bantuan sosial dan spiritual khusus untuk para pekerja migran, dan juga memberikan pelajaran khusus bagi para pekerja yang belum fasih berbahasa inggris. Berada dalam ruang lingkup yang sama, HOME juga merupakan NGO yang berfungsi sebagai organisasi advokasi bagi para pekerja migran yang membutuhkan lembaga advokasi. HOME akan membantu pekerja migran hingga masalah mereka dapat sampai di Kejaksaan, dan Pengadilan Tenaga Kerja, dimana organisasi advokasi masih sedikit di Singapura.

Berkat dua kelompok ini, banyak perubahan yang terjadi dalam peraturan mengenai pekerja migran, seperti dinaikkannya umur minimum untuk pekerja migran domestik, dan diterapkannya hari libur bagi para pekerja migran yang sebelumnya tidak ada, selain itu juga dibentuknya *Foreign Manpower Management Division* untuk memantau bagaimana kondisi para pekerja migran dan memberikan kursus orientasi bagi perekrut yang baru pertama kali mulai bekerja.³²

³² Shirlena Huang dan Brenda S.A. Yeoh, "Chapter 10: Foreign Domestic Workers in Singapore: A Neglected Social Issue?," di

dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chan, 216-240. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2015, hal. 235.

Kelompok masyarakat sipil seperti MARUAH dan Think Centre juga ikut membantu untuk menyuarkan kebebasan di media Singapura sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kebebasan berpendapat melalui media massa di Singapura yang sering menjadi isu di sana.

Koalisi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang hendak dicapai, salah satunya seperti koalisi pendukung pekerja migran yang terbentuk pada tahun 2019 dimana TWC2, Migrant Voices dan HOME bersatu dan dikenal dengan nama Solidarity for Migrant Workers.³³ Koalisi lain yang terbentuk adalah Solidarity for Migrant Workers yang merupakan gabungan dari Migrant Voices, TWC2, dan HOME. Koalisi ini bertujuan untuk menunjukkan pertumbuhan dari kelompok migran di Singapura dimana 30% dari tenaga kerja Singapura berasal dan sebagian besarnya memiliki posisi dengan bayaran yang rendah.³⁴

E. Pengaruh Kelompok Masyarakat Sipil terhadap Ratifikasi ICERD oleh Singapura

Perkembangan kelompok masyarakat sipil yang masif terjadi di Singapura membawa dampak baik bagi kelompok minoritas dan migran yang telah sejak lama mengalami diskriminasi HAM di Singapura. Walaupun pergerakan mereka terhambat oleh PAP yang menganggap kelompok masyarakat sipil itu sebagai ancaman untuk kekuasaan mereka, para kelompok masyarakat sipil tetap berhasil

menyebarkan pengaruhnya untuk membela mereka yang mengalami diskriminasi.

Keberadaan internet sangat membantu kelompok masyarakat sipil untuk menyebarkan informasi terkait kasus-kasus dan isu diskriminasi ras yang terjadi di Singapura secara lebih luas. HOME, TWC2, Think Centre dan beberapa NGO lainnya selalu memposting kasus-kasus atau laporan baru jika mereka menerimanya. Setiap setahun sekali, para kelompok masyarakat sipil ini akan membuat laporan mengenai keadaan HAM di Singapura dan memberikannya kepada pemerintah maupun memposting nya secara online di laman resmi mereka.

NGO sering memanfaatkan hari peringatan nasional maupun internasional, seperti Hari Buruh Internasional dan Hari HAM Internasional untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik itu langsung melakukannya di tempat, maupun dengan menyebarkannya melalui website dan sosial medianya.

Beberapa kelompok masyarakat sipil bahkan bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat program yang mempromosikan keharmonisan sosial kepada publik. Tidak jarang aksi jalanan yang dilakukan memberikan dampak pada perubahan peraturan di Singapura. Hal ini lah yang mendorong NGO untuk terus menyuarkan aspirasi mereka mengenai HAM di Singapura, salah satunya adalah meminta pemerintah untuk meratifikasi ICERD.

Walaupun pemerintah sudah

³³ Stephan Ortmann, "Political Change and Civil Society Coalitions in Singapore," *Government and Opposition*, Vol.50 (1), 2015, hal.129

³⁴ Stephan Ortmann, *ibid.*

mulai mengubah stereotipe mereka mengenai kelompok masyarakat sipil, dan sering berdiskusi dengan mereka, namun pemerintah juga tak jarang membatasi gerak dari kelompok masyarakat sipil sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan aksi di tempat umum, bahkan untuk sekedar menyebarkan informasi di dunia maya. Tidak banyak koalisi masyarakat sipil yang dapat bertahan lama, banyak yang berhenti karena peraturan yang mengekang, tapi tidak sedikit pula yang berhenti karena adanya perbedaan pendapat antar kelompok masyarakat sipil. COSINGO berhasil bertahan dan akhirnya mencapai tujuannya yaitu menyerahkan laporan mengenai keadaan HAM di Singapura pada tahun 2015 kepada UN Universal Periodic Review.

Akhirnya, 19 Oktober 2015 Singapura pun memutuskan untuk menandatangani ICERD dengan syarat Singapura harus menerapkan kebijakan tentang penerimaan dan aturan untuk para pekerja asing yang memiliki izin kerja.³⁵ Hal ini dilakukan untuk mempromosikan integrasi dan kohesi antar ras dan etnis di tengah masyarakat Singapura.

Pada UPR 2016 ini juga, COSINGO mendesak Singapura untuk meratifikasi perjanjian inti HAM internasional, salah satunya ICERD. Melalui UPR ini, COSINGO terutama MARUAH menyarankan untuk segera meratifikasi. Sebelumnya, MARUAH jugalah

yang menyarankan dan merekomendasikan Singapura untuk menandatangani ICERD dengan melihat fenomena yang terjadi lapangan. Berdasarkan laporan yang diberikan kepada UPR saat Pre-Session, November 2015,³⁶

International Federation for Human Rights (FIDH) bersama Function 8 dan Think Centre sangat mendukung Singapura untuk meratifikasi ICERD.

Aksi yang dilakukan oleh para kelompok masyarakat sipil juga menjadi salah satu faktor yang menguatkan pemerintah untuk meratifikasi ICERD. Seperti aksi yang dilakukan oleh MARUAH yang bertajuk “The Sorry State of Human Rights in Singapore” pada Desember 2016 yang diadakan di Speaker’s Corner bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia Internasional pada tanggal 10 Desember.³⁷ Aksi ini mengajak masyarakat untuk ikut melindungi HAM, dan melindungi serta menyelamatkan mereka yang mengalami diskriminasi.

Selain itu, pada Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 May 2016, Think Centre membuat pesan kepada pemerintah, salah satunya yaitu untuk segera membuat kebijakan yang lebih jelas mengenai para pekerja terutama pekerja asing yang menikahi orang asli Singapura.³⁸ Laporan-laporan mengenai pekerja migran dan juga pekerja migran domestik yang selalu dibuat oleh HOME dan TWC2 secara

³⁵ MARUAH, “MARUAH statement at UPR pre-session on Singapore,” 2015, diakses pada 13 September 2022, <https://maruah.org/2015/12/16/maruah-statement-at-upr-pre-session-on-singapore/#more-2107>.

³⁶ MARUAH, *ibid*.

³⁷ MARUAH, “The Sorry State of Human Rights in Singapore,” 5 Desember 2016,

diakses pada 15 September 2022, <https://maruah.org/2016/12/05/the-sorry-state-of-human-rights-in-singapore/>

³⁸ Think Centre, “Think Centre’s 2016 Labour Day Message,” 1 May 2016, diakses pada 15 September 2022, <https://www.thinkcentre.org/article.php?id=3260>

tidak langsung mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan pekerja migran, dan untuk memperjelas kebijakan mengenai mereka.

SINGAPURA MERATIFIKASI ICERD

A. Proses Ratifikasi ICERD oleh Singapura

Singapura menandatangani ICERD pada 19 Oktober 2015 dengan syarat penerimaan migran yang memiliki izin kerja serta peraturannya. Beberapa bulan setelahnya, UPR diadakan dan menjadi UPR kedua bagi Singapura setelah UPR pertama pada tahun 2011. Hasil dari UPR menunjukkan beberapa saran dan tuntutan yang disampaikan baik dari kelompok masyarakat sipil, organisasi internasional maupun negara anggota lainnya. Mereka menuntut Singapura untuk segera meratifikasi ICERD.

Pada 27 November 2017, Singapura akhirnya meratifikasi ICERD sesuai dengan janji mereka ketika pelaksanaan UPR pada tahun 2016. Singapura menyerahkan initial reportnya kepada CERD pada 2018, dan setelah itu Singapura mengikuti Periodic Review pertamanya pada November 2021 ketika 105th session CERD dilaksanakan.³⁹ Singapura berhasil meratifikasi ICERD setelah 52 tahun di karena kan adanya pengaruh dari kelompok masyarakat sipil yang dipicu oleh perubahan sistem ekonomi yang digunakan menjadi neoliberalisme.

Melalui Periodic Review ini, CERD meminta kelompok masyarakat sipil untuk memberikan laporan sebagai informasi tambahan. Kemudian, semua shadow report yang telah diberikan oleh 4 NGO sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat sipil di Singapura, yang diantaranya adalah HOME, TWC2, CAN Singapore (Community Action Network), Transformative Justice Collective (TJC), Anti-Racism Coalition (ARC) ini disampaikan pada Periodic Review. Shadow report yang diberikan oleh 4 NGO tersebut berisikan isu-isu diskriminasi ras yang banyak terjadi di Singapura yang masih belum ditangani atau diperbaiki sepenuhnya oleh pemerintah Singapura, seperti permasalahan pekerja migran domestik, diskriminasi yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas juga layanan umum yang tidak dapat menjangkau semua orang, salah satunya adalah layanan kesehatan.

Concluding Observations atau Kesimpulan Pengamatan untuk Initial Report Singapura keluar pada 22 Januari 2022, setelah sebelumnya tertunda karena pandemic COVID-19. Laporan tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua⁴⁰; pertama, komite yang memuji sikap Singapura yang berusaha untuk menjaga keharmonisan antar ras dan agama, terutama di kursi pemerintahan. Lalu, komite juga memuji langkah Singapura untuk menandatangani dan mengadopsi beberapa perjanjian

³⁹ MCCY, "Singapore reaffirms commitment to address racial discrimination in its presentation of its first state party report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination," 2021, diakses pada 11 Agustus 2022, pukul 21.55, <https://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2021/nov/icerd#:~:text=Singapor>

[e%20signed%20the%20Convention%20on,a%20harmonious%20multi%2Dracial%20society](https://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2021/nov/icerd#:~:text=Singapore%20signed%20the%20Convention%20on,a%20harmonious%20multi%2Dracial%20society).

⁴⁰ Committee on the Elimination of Racial Discrimination, "Concluding observation on the initial report of Singapore," 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fSGP%2fCO%2f1&Lang=en

HAM internasional. Kedua, komite membahas mengenai beberapa masalah yang masih ada di Singapura, dan juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Singapura untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

B. Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Diskriminasi Ras di Singapura

Untuk menjaga keharmonisan sosial sesuai dengan landasan dasar Singapura, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya diskriminasi ras di tengah masyarakatnya. Pada bidang kesehatan, Singapura telah membuat beberapa kebijakan seperti Medisave, akun yang dibuat untuk penyimpanan uang khusus untuk biaya kesehatan. Sistemnya yang memberlakukan 'satu akun, satu keluarga' membuat satu akun Medisave bisa digunakan oleh satu keluarga jika akun Medisave anggota keluarga yang lain saldonya tidak mencukupi. MediShield Life adalah versi lebih baik dari Medisave yang mencukupi biaya kesehatan semua orang Singapura sejak lahir, dan untuk lansia berumur 90 tahun keatas dan rentan terhadap penyakit masuk ke kebijakan The Pioneer Generation Package. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah akan mencukupi biaya kesehatan bagi pasien rawat inap dan pasien rawat di rumah, dan mereka yang memiliki disabilitas fungsional. Seperti Medisave, dimana pemerintah menyarankan organisasi komunitas untuk menjadi pihak supporter setelah individu dan keluarga.⁴¹

⁴¹ Jeremy Lim dan Manav Saxena, "Social Challenges in Singapore's Healthcare System," di dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chen (Singapore: World Scientific Publishing, 2015), hal.83

Singapura juga memiliki undang-undang khusus untuk muslim yaitu *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) yang dibentuk pada tahun 1966 dibawah Kementerian Budaya, Komunitas dan Pemuda (MCCY) dan Kementerian Urusan Muslim yang setelah dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut.⁴² Ada juga instrument legal lainnya yang dibuat oleh pemerintah Singapura untuk menjaga keharmonisan ras dan agama, seperti pemerintah yang menjamin adanya kebebasan beragama di dalam Pasal 15, *The Sedition Act*. Pemerintah juga menyediakan tempat khusus bagi kelompok masyarakat sipil yang ingin melakukan aksi atau acara, yaitu Speaker's Corner, dengan tujuan agar aksi yang dilakukan menjadi lebih tertib, rapi dan teratur.

Selain itu, pemerintah juga membuat *The OB markers*. *OB (out of bonds) markers* adalah representasi dari tindakan pencegahan yang dianggap perlu untuk menghindari skenario yang berpotensi untuk membahayakan negara.⁴³ Ada beberapa kebijakan yang dibuat khusus untuk meningkatkan keharmonisan sosial dan menjunjung tinggi kehidupan multiras di Singapura, seperti *Ethnic Integration Policy (EIP)*, *Self-Help Groups*, *Group Representation Constituency (GRC)*, *Presidential Council for Minority Rights*.

C. Implementasi ICERD oleh Singapura

Singapura membuat beberapa kebijakan baru pasca bergabungnya

⁴² Mathew Mathews dan Mohammad Khamsya Bin Khidzer, (2015), op.cit, hal.115

⁴³ Ibid, Hal 117.

negara tersebut ke dalam ICERD. Pada tahun 2016, pemerintah mengamandemen undang-undang mengenai pemilihan presiden, dimana jika sebuah ras sudah menjabat selama 5 periode berturut-turut maka, pemilihan berikutnya akan digulirkan kepada ras lain, sehingga etnis lain juga dapat terwakilkan dalam kursi presiden. Kebijakan ini mulai berlaku ketika Pemilihan Presiden 2017 diadakan, yang kemudian membawa Halimah Yacob, seorang politisi perempuan berdarah Melayu, menjadi presiden Singapura beretnis Melayu setelah 30 tahun lamanya.

Tidak hanya itu, Singapura yang menyadari bahwa fenomena diskriminasi ras masih banyak terjadi di dunia kerja juga membuat kebijakan baru yang mengatur bagaimana lingkungan kerja yang harmonis dan anti terhadap diskriminasi. Kebijakan ini membedakan antara diskriminasi langsung dan tidak langsung yang nantinya akan dikenai sanksi afirmatif bagi pelakunya. Selain itu, para wanita muslim yang menjadi pekerja di Singapura pun sudah diperbolehkan untuk menggunakan hijab di tempat kerja mereka berdasarkan undang-undang baru tersebut. Pada November 2021, pemerintah juga sudah memperbolehkan penggunaan hijab di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit.

Kebijakan mengenai keharmonisan rasial pun terus bertambah dan diperbaharui.

Kebijakan baru yang dibuat pun bertujuan untuk membentuk perilaku dan norma sosial masyarakat Singapura yang toleransi, dan harmonis. Sanksi yang diberikan bukan merupakan hukuman pidana melainkan hukuman non-punitif, dan adanya program baru yaitu SG Core atau Cohesion and Resilience yang melatih komunitas yang bergabung dengan mereka untuk menciptakan keharmonisan multiras.⁴⁴

MCCY meluncurkan dua program untuk mendukung integrasi rasial dan mengurangi adanya diskriminasi ras. Harmony Fund, dan Broadening Religious/Racial Interaction through Dialogue and General Education (BRIDGE). The Harmony Fund dibuat untuk memberikan bantuan finansial bagi kelompok masyarakat sipil, organisasi atau lembaga masyarakat yang ingin menjalankan sebuah proyek yang berfokus untuk mempromosikan integrasi rasial dan mengatasi adanya diskriminasi ras di Singapura. Program ini akan di tinjau setiap 3 tahun sekali untuk meningkatkan keefektifitasannya dan untuk menambah dana bantuan.⁴⁵

KESIMPULAN

Perjanjian HAM internasional memiliki konsekuensi tersendiri jika negara yang meratifikasi perjanjian tidak berkomitmen penuh. Negara meratifikasi perjanjian tersebut untuk memperbaiki keadaan HAM yang ada di sana. Sebuah negara meratifikasi perjanjian HAM internasional

⁴⁴ Justin Ong, "Singapore's new race law to include non-punitive sanctions to shape social behavior," The Strait Times, diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 06.54, <https://www.straittimes.com/singapore/policies/singapores-new-race-law-to-include-non-punitive-sanctions-to-shape-social>

⁴⁵ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, "Initial report submitted by Singapore under article 9 of the Convention, due in 2018," 2019, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fSGP%2f1&Lang=en

menurut Hathaway berdasarkan biaya komitmen yang didapatkan oleh negara tersebut. Dalam sudut pandang rasionalis, sebuah negara akan meratifikasi sebuah perjanjian HAM internasional jika perjanjian tersebut dapat memenuhi kepentingan negara dengan mempertimbangkan faktor domestik dan internasionalnya.

Singapura sebagai negara multi-etnis yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial, tak luput dari peristiwa diskriminasi ras. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi adanya tindakan diskriminasi di tengah masyarakat, salah satunya adalah Singapura yang meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) pada 27 November 2017. Namun, sebagai negara semi-otoriter, sulit bagi kelompok masyarakat sipil untuk berkembang dan menyuarakan aspirasi mereka di Singapura. Hak-hak individu pun banyak dibatasi, sehingga sulit bagi masyarakat untuk bersuara mengenai masalah yang mereka alami. Tidak sedikit tanggapan buruk mengenai HAM yang diterima oleh Singapura dari dunia internasional. Bertentangan dengan fakta di atas, Singapura meratifikasi ICERD pada tahun 2017.

Singapura mengubah sistem ekonomi mereka yang sebelumnya semi-otoriter menjadi neoliberal, sehingga banyak terjadi kemajuan dan perkembangan, di antaranya adalah keberadaan kelompok masyarakat sipil yang sudah dianggap penting, dan tidak lagi dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Kelompok masyarakat sipil semakin berani untuk beraksi dan menyuarakan aspirasi mereka mengenai masalah HAM yang terjadi

di Singapura, seperti diskriminasi antar etnis. COSINGO sebagai salah satu koalisi kelompok masyarakat sipil berhasil menyampaikan saran mereka melalui laporan yang diberikan kepada *Universal Periodic Review* (UPR) selama UPR *Pre-Session* pada tahun 2015. Ketika UPR diadakan pada Juni 2016, COSINGO dan beberapa kelompok masyarakat sipil merekomendasikan Singapura untuk segera meratifikasi ICERD secepatnya, agar diskriminasi antar etnis yang terjadi di Singapura dapat hilang sepenuhnya. Selain itu, aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil juga turut berpartisipasi dalam mendorong pemerintah Singapura untuk meratifikasi ICERD. Oleh karena itu, pengaruh kelompok masyarakat sipil yang kuat pada pemerintah mampu membuat pemerintah Singapura untuk meratifikasi ICERD pada tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dayley, Robert dan Clark D. Neher. *Southeast Asia in the New International Era*, 6th ed. Boulder: Westview Press. 2013.

Henrard, Kristin dan Robert Dunbar. *Synergies in Minorities Protection: European and International Law Perspectives*. Cambridge University Press, 2009.

Huang, Shirlena dan Brenda S.A. Yeoh. "Chapter 10: Foreign Domestic Workers in Singapore: A Neglected Social Issue?," di dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chan, 216-240. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2015.

Lim, Jeremy dan Manav Saxena. "Chapter 3: Social Challenges in Singapore's Healthcare System," di dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chan, 78-92. Singapore: World Scientific Publishing, 2015.

Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990.

Mathews, Mathew dan Mohammad Khamsya Bin Khidzer. "Chapter 5: Preserving Racial and Religious Harmony in Singapore," di dalam *50 Years of Social Issues in Singapore*, editor David Chan, 108-132. Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2015.

Jurnal

Anwar, Syamsul dan Kharisma Danang Yuangga, "Pertumbuhan Ekonomi di Singapura sejak Berdirinya Monetary Authority of Singapore," *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, Vol. 4 (1), (2019), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Eduka/article/view/3825>

Bowen, Gleen A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, vol.9, no.2 (2009): 27-40.

Chew, Peter K.H. "Racism in Singapore: A Review and Recommendations for Future Research," *Journal of Pacific Rim Psychology*, Vol.12, e5, (2018).

Hathaway, Oona A. "The cost of commitment." *Stanford Law Review*. Vol.55 (2002): 1821.

Hussin, "The Singapore Minority Dilemma," *Asian Survey*, Vol.51, No.6 (November/December 2011), pp.1156-1171, Hal. 1169, diakses pada 18 Juli 2022, pukul 12.39, melalui https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2011.51.6.1156?seq=14#metadata_info_tab_contents

Ortmann, Stephan. "Political Change and Civil Society Coalitions in Singapore." *Government and Opposition*, Vol. 50, No.1 (2015): 119-139.

Rodan, Garry. "Singapore 'Exceptionalism'? Authoritarian Rule and State Transformation," *Asia Research Centre, Working Paper* No.131, Murdoch University, (May 2006).

Subchi, Imam, dkk. "Discrimination among Ethnic Minorities Groups in Singapore." *INSANIYAT, Journal of Islam and Humanities*, Vol.5, No.2 (Mei 2021): 77-90.

Velayutham, Selvaraj. "Everyday Racism in Singapore," di dalam *Everyday Multiculturalism*, (Palgrave Macmillan UK, 2009), hal.265,266,268, https://www.researchgate.net/publication/352837277_Everyday_Racism_in_Singapore

Dokumen

Committee on the Elimination of Racial Discrimination, "Concluding observation on the initial report of Singapore," 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fSGP%2fCO%2f1&Lang=en

Community Action Network (Singapore). "Health and Racial Discrimination."

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SGP/INT_CERD_NGO_SGP_47089_E.pdf

General Recommendation No.32.

"International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination." CERD/C/GC/32. <https://tbinternet.ohchr.org/layout/set/print/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fGC%2f32&Lang=en>

Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) & Transient Workers Count Too (TWC2). "International

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) Shadow Report for Singapore)." Oktober 2021.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/SGP/INT_CERD_NGO_SGP_47073_E.pdf

HOME. "Wage Theft & Exploitation among Singapore's Migrant Workers." 2017.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, "Initial report submitted by Singapore under article 9 of the Convention, due in 2018." 2019.

<https://tbinternet.ohchr.org/layout/set/print/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fSGP%2f1&Lang=en>

McDougall, Gay. "The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination." United Nations Audiovisual Library of International Law. 2021.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cerd/cerd_e.pdf

Singapore Government. "Population in Brief 2021." 2021.

<https://www.population.gov.sg/files/media-centre/publications/population-in-brief-2021.pdf>.

Website

Blackbox. "Workplace Discrimination: How Harmonious Are We?." diakses pada 21 Juli 2022, pukul 14.35, <https://blackbox.com.sg/everyone/discrimination-in-singapore-how-harmonious-are-we>

Hirschmann, R. "Perceptions of discrimination when using public services Singapore 2019." <https://www.statista.com/statistics/1045089/singapore-discrimination-when-using-public-services/>, di dalam Imam Subchi, dkk. "Discrimination among Ethnic Minorities Groups in Singapore." *INSANIYAT, Journal of Islam and Humanities*, Vol.5 (2), (May, 2021): 77-90.

Lai, Linette. "Singapore submits first report on ICERD, the convention to eliminate racial discrimination." *The Strait Times*, diakses pada 30 Desember 2021, pukul 10.09. <https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-submits-first-report-on-icerd-the-convention-to-eliminate-racial-discrimination>

MARUAH. "MARUAH statement at UPR pre-session on Singapore."

2015, diakses pada 13 September 2022.

<https://maruah.org/2015/12/16/maruah-statement-at-upr-pre-session-on-singapore/#more-2107> .

MARUAH. “The Sorry State of Human Rights in Singapore.” 5 Desember 2016, diakses pada 15 September 2022. <https://maruah.org/2016/12/05/the-sorry-state-of-human-rights-in-singapore/>

MCCY. “Singapore reaffirms commitment to address racial discrimination in its presentation of its first state party report to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.” 2021. diakses pada 11 Agustus 2022, pukul 21.55, <https://www.mccy.gov.sg/about-us/news-and-resources/press-statements/2021/nov/icerd#:~:text=Singapore%20signed%20the%20Convention%20on,a%20harmonious%20multi%2Dracial%20society>

Ong, Justin. “60% of job discrimination complaints in S’pore each year are nationality-based.” The Straits Times Website, diakses pada 11 April 2022. <https://www.straitstimes.com/singapore/politics/60-of-job-discrimination-complaints-in-singapore-each-year-are-nationality-based>

Ong, Justin. “Singapore’s new race law to include non-punitive sanctions to shape social behavior.” The Straits Time Website, diakses pada 13 April 2022, pukul 14:28. <https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapores-new-race-law-to-include-non-punitive-sanctions-to-shape-social-behavior>

[race-law-to-include-non-punitive-sanctions-to-shape-social](https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapores-new-race-law-to-include-non-punitive-sanctions-to-shape-social-behavior)

REACH Website. “Public Consultation on Singapore’s Draft State Party Report on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).” diakses pada 29 Januari 2022, pukul 13.27. <https://www.reach.gov.sg/participate/public-consultation/ministry-of-culture-community-and-youth/community-relations-and-engagement-division/public-consultation-on-singapores-draft-state-party-report-on-icerd>

Think Centre. “Think Centre’s 2016 Labour Day Message.” 1 May 2016. diakses pada 15 September 2022. <https://www.thinkcentre.org/article.php?id=3260>

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner Website. “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.” diakses melalui pada 30 Januari 2021, pukul 08.57. <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>.